

Dukungan Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah Menunjang Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ceria Isra Ningtyas^{1*}; Ashry Noviana Fajry²; Dhian Deliani³.

¹ Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian ² Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

³ Biro Tata Usaha, Kementerian Sekretariat Negara

ceria.israningtyas@pertanian.go.id

Disubmit: 21 Mei 2019 | Direview: 8 Agustus 2019 | Diterima: 24 Maret 2020

ABSTRACT

Public information organization and services are the main activities of the Chief of Information and Documentation Officer (PPID). In this case, the library unit has a function as a supporting process of PPIDs' activities in an institution. This supporting process cannot be separated from the perception of the head of the libraries in terms of library supports in supporting PPIDs' performances. This study attempts to find out the perception of the head of the libraries in terms of library supports to PPIDs' performance. The purpose of this study (1) to explore library supports for the PPIDs' performance and (2) to explain the obstacles of the library leaders in developing those supports. There are seven aspects of supports exploring in this study, which are: Knowledge, Coordination, Public information organization, PPIDs' service, budget allocation, information system development and reporting. This study developed using qualitative methods by interviewing 16 informants who are the leaders of the government libraries. The results of this study are: (1) in general, library unit supports for the PPIDs' performance based on the perception of heads/library leaders is still low. There is only one aspect, which is Knowledge that shows as high. Other six aspects are still in medium and low category. The barriers faced by the heads/library leaders in supporting PPID are the lack of synergy between the PPID unit and the library unit, and the lack of regulatory supports from the head of the institutions.

ABSTRAK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan inti dari kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik di Indonesia. Dalam hal ini, unit perpustakaan berfungsi sebagai proses pendukung (*support processes*) kegiatan PPID. Proses dukungan dari unit perpustakaan kepada unit layanan informasi publik PPID tidak dapat dipisahkan dari persepsi kepala perpustakaan mengenai dukungan yang dilakukan dalam membantu PPID menjalankan tugasnya. Penelitian ini berusaha menggali persepsi kepala/pimpinan perpustakaan khusus instansi pemerintah mengenai dukungan perpustakaan terhadap kinerja PPID dalam menjalankan tugasnya di instansinya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengeksplorasi dukungan perpustakaan terhadap kinerja PPID berdasarkan persepsi kepala/pimpinan perpustakaan dan (2) menjelaskan hambatan kepala perpustakaan dalam mendukung kinerja PPID. Terdapat 7 (tujuh) aspek dukungan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Pengetahuan, Koordinasi, Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, Pelayanan PPID, Anggaran, Pengembangan Sistem Informasi, dan Pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 16 orang informan yang merupakan pimpinan/kepala perpustakaan pada perpustakaan instansi pemerintah. Hasil penelitian ini yaitu, secara umum, dukungan unit perpustakaan untuk menunjang tugas PPID berdasarkan persepsi kepala/pimpinan perpustakaan pada instansi kementerian/lembaga masih rendah. Hanya ada satu aspek yang tergolong tinggi yaitu aspek pengetahuan. Enam aspek lainnya masih tergolong sedang dan rendah. Adapun hambatan yang dirasakan oleh kepala/pimpinan perpustakaan dalam mendukung kinerja PPID adalah belum adanya sinergisitas antara unit layanan informasi publik dengan unit perpustakaan, dan kurangnya dukungan regulasi dari pimpinan instansinya.

Keywords: Supporting processes, Special libraries, Chief of information and documentation, Public information service units

PENDAHULUAN

Salah satu implementasi dari lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Indonesia, 2008) pada tiap badan publik di Indonesia yaitu

dengan ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dikembangkannya sistem penyediaan layanan informasi publik. Dengan demikian, hampir semua badan publik kini memiliki unit baru yang menangani informasi publik yang dipimpin oleh PPID. PPID memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Di sisi lain, perpustakaan sebagai unit yang telah lama ada di badan publik, yang salah satu tugasnya juga mengelola dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, seharusnya memiliki koordinasi yang baik dengan PPID.

Lebih khusus, PPID memiliki 5 peran strategis dalam mengimplementasikan UU KIP, yaitu: menyediakan informasi, menyimpan dan mendokumentasikan informasi, mengamankan informasi, memberikan layanan informasi dan sebagai *Business Process Re-engineering Agent* dalam mendukung kewajiban badan publik dan tugas PPID dalam kegiatan birokratif dan administratif (Warenpan et al, 2018). Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran PPID tidak hanya sebatas memberikan layanan informasi, namun juga mencakup banyak hal, yaitu mulai dari penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan pengamanan informasi.

Dalam hal cakupan informasi, PPID memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan 3 jenis informasi terkait lembaganya, yaitu: Informasi yang wajib dan disediakan dan diumumkan secara berkala (UU No. 14 tahun 2008 Pasal 9); Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (UU No. 14 tahun 2008 Pasal 10) dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat (UU No. 14 tahun 2008 Pasal 11). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa cakupan informasi apa saja yang harus disediakan dan diumumkan oleh setiap badan publik sangat luas, jelas dan rinci tertuang pada UU tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, selain menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan tatap muka, banyak PPID di badan publik juga telah membuat layanan online yang memberikan mekanisme atau prosedur layanan informasi yang dapat diakses melalui website lembaga mereka. Bahkan beberapa lembaga terus mengembangkan inovasinya untuk meningkatkan pelayanan PPID, salah satu contohnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang meluncurkan 3 inovasi baru, di antaranya: perumusan konsekuensi dari setiap informasi yang dinilai perlu dikecualikan untuk tidak diberikan kepada pemohon informasi; membuat aplikasi e-PPID berbasis *mobile* dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi (SI) PPID (Kementerian Keuangan, 2017).

Pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian ditegaskan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan (Indonesia, 2010). Salah satu contohnya, pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Pustakawan sebagai salah satu pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010).

Namun, di sisi lain masih banyak badan publik yang belum maksimal mengelola PPID di lembaganya (Kenda, 2015; Musajaya, 2017; Susilowati, 2014; Yasha, 2015). Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan beberapa hambatan dalam mengimplementasikan UU KIP (Yasha, 2015). Aritonang (2011) menguraikan tiga faktor utama implementasi UU KIP di Indonesia, yaitu organ pendukung, proses dan praktek serta budaya birokrasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kenda (2015) mengungkapkan bahwa implementasi PPID di Pemerintah Provinsi Gorontalo belum optimal karena minimnya kesiapan badan publik dalam hal kelembagaan, SDM, infrastruktur,

komitmen, regulasi, anggaran, kerjasama, kemitraan, koordinasi dan masih terbatasnya tanggung jawab PPID akan keseluruhan pelayanan informasi publik. Hal yang sama yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Budiani dan Suliyati (2016) yang mengungkapkan bahwa terbatasnya pengetahuan SDM pengelola layanan informasi PPID, minimnya anggaran dan tidak konsistensinya struktur PPID badan publik pada surat keputusan dengan kenyataan di lapangan merupakan hambatan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di Jawa Tengah.

Dari beberapa penelitian yang membahas kinerja PPID di atas, masih sangat jarang atau belum banyak penelitian yang membahas mengenai peranan perpustakaan dalam mendukung kinerja PPID di lembaganya, terutama dari sisi persepsi Kepala Perpustakaan. Untuk itu, penelitian ini akan membahas hal tersebut sebagai penelitian awal mengenai sinergi Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah dengan PPID. Terdapat tujuh aspek yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu: dukungan dalam hal Pengetahuan, Koordinasi, Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, Pelayanan PPID, Anggaran, Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Pustakawan dan Perpustakaan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID. Sebagai unit pengelola dan penyedia layanan informasi yang sudah berjalan sebelum ada PPID, Perpustakaan memiliki potensi yang besar untuk mendukung kegiatan PPID agar lebih optimal. Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, untuk mengeksplorasi mengenai dukungan perpustakaan khusus instansi pemerintah dalam mendukung kinerja PPID, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana persepsi kepala/pimpinan perpustakaan kementerian dan lembaga dalam mendukung kinerja PPID di instansinya? Adapun beberapa hal yang ingin dijelaskan dari makalah ini yaitu: (1) Bagaimana dukungan perpustakaan terhadap kinerja PPID berdasarkan persepsi kepala/pimpinan perpustakaan khusus instansi pemerintah dan (2) Apa saja hambatan kepala perpustakaan khusus instansi dalam mendukung kinerja PPID? Terdapat 7 (tujuh) aspek dukungan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Pengetahuan, Koordinasi, Pengelolaan Dokumen Publik, Pelayanan PPID, Anggaran, Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan.

Secara teoretis, makalah ini diharapkan menjadi referensi bagi pengayaan khasanah ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya kajian fungsi perpustakaan dalam pengelolaan informasi publik. Dalam konteks yang spesifik adalah mendapatkan pengetahuan bagaimana pola koordinasi unit perpustakaan dengan unit pengelolaan layanan informasi publik PPID instansi pemerintah. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan layanan informasi pada badan publik pada umumnya dan perpustakaan khusus instansi pemerintah di Indonesia pada khususnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah kepala/pimpinan perpustakaan di kementerian/lembaga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi-interaktif kepada informan kepala/pimpinan perpustakaan di kementerian/lembaga melalui sarana sosial media WhatsApp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini Peneliti mewawancarai 16 orang informan untuk penelitian ini yang tersaji pada Tabel 1. Dari hasil jawaban wawancara oleh para informan menunjukkan deskripsi karakteristik yang memberikan gambaran mengenai identitas informan dalam pengkajian ini. Hal ini dikarenakan dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel maka akan

dapat diketahui sejauh mana informasi yang disampaikan oleh responden. Berdasarkan hal tersebut, deskripsi karakteristik responden kepala/pimpinan perpustakaan di kementerian/lembaga pada kajian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: jenis kelamin, pendidikan formal, jabatan, masa kerja keseluruhan, serta masa kerja sebagai kepala/pimpinan perpustakaan. Tabel karakteristik informan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Jabatan Informan	Instansi
1.	Kepala Bagian Perpustakaan	Kementerian Sekretariat Negara
2.	Kepala Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Lembaga Administrasi Negara
4.	Kepala Perpustakaan	Kementerian Koperasi dan UKM
5.	Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
6.	Kepala Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi	Kementerian Keuangan
7.	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi	Kementerian Perindustrian
8.	Kepala Subbagian Perpustakaan	Kementerian Luar Negeri
9.	Kepala Subbagian Perpustakaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Kepala Subbagian Perpustakaan	Kementerian Agama
11.	Kepala Subbagian Perpustakaan	Kementerian Perdagangan
12.	Kepala Subbagian Perpustakaan	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
13.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan Nuklir	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
14.	Kepala Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan	Kementerian Pertanian
15.	Pustakawan selaku Penanggungjawab/Koordinator Perpustakaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16.	Pustakawan selaku Penanggungjawab/Koordinator Perpustakaan	Mahkamah Konstitusi

Tabel 2. Karakteristik Informan

No.	Karakteristik Informan	Jumlah	%	
1.	Jenis Kelamin	Pria	10	62,50
		Wanita	6	37,50
2.	Pendidikan Formal	S1	7	43,8
		S2	9	56,3
3.	Jabatan	Pejabat Struktural Eselon III	3	18,80
		Pejabat Struktural Eselon IV	11	68,89
		Pejabat Fungsional Pustakawan	2	12,31
4.	Masa Kerja	6-10 Tahun	1	6,2
		11-15 Tahun	5	31,3
		16-20 Tahun	4	25
		> 21 tahun	6	37,5
5.	Masa Kerja sebagai Kepala/Pimpinan Perpustakaan	0-2 Tahun	8	50
		3-5 Tahun	4	25
		6-10 Tahun	3	18,8
		>10 Tahun	1	6,2

1. Dukungan Perpustakaan terhadap kinerja PPID

a. Pengetahuan

Dalam hal pengetahuan mengenai PPID, 87,5% informan menjawab mengetahui tentang PPID. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan sudah familiar dengan tugas pokok dan fungsi PPID.

b. Koordinasi

Dalam hal koordinasi dengan layanan informasi publik, 56,3% informan menyatakan telah melakukan koordinasi. Dukungan pimpinan terkait juga dengan koordinasi yang dilakukan antara PPID dan perpustakaan. Sebanyak 43,8% informan menyatakan telah mendapatkan dukungan dari pimpinan instansi/pimpinan PPID terhadap pengelolaan unit perpustakaan. Bentuk dukungan tersebut berupa adanya komunikasi dan koordinasi dari PPID kepada kepala perpustakaan jika ada permohonan informasi publik yang bahan informasinya terdapat di perpustakaan, penyediaan bahan-bahan publikasi informasi publik yang dicetak oleh unit layanan informasi publik di perpustakaan kepada unit perpustakaan, serta adanya ruang khusus layanan informasi publik (PPID Corner) yang berdampingan dengan ruang perpustakaan. Selain itu, terdapat juga dukungan dari pimpinan instansi kepada unit perpustakaan berupa penyediaan fasilitas (perangkat komputer, jaringan internet dan *hardisk* eksternal), SDM, anggaran, pembuatan SK yang mencantumkan SDM unit perpustakaan untuk kegiatan layanan informasi publik, serta mendukung berlangsungnya kegiatan unit perpustakaan agar lebih berkembang dan dikenal masyarakat. Namun, dalam hal keikutsertaan atau penugasan dalam kegiatan PPID, hanya 31,3% informan yang menjawab telah dilibatkan secara langsung. Hanya 12,5% informan yang menjawab SDM perpustakaan dicantumkan dalam SK/Struktur PPID.

c. Pengelolaan Dokumen Publik

Dalam hal pengelolaan dokumen, hanya 1 orang informan yang secara resmi mendapat penugasan untuk menyusun Daftar Informasi Publik/DIP pada instansinya. Selain itu, terdapat 4 informan yang mendapat penugasan untuk mengelola dokumen publik. Namun demikian, sebagian besar informan menyatakan telah melakukan inisiatif mengumpulkan dan mengelola dokumen publik instansinya. Dalam hal ini, pustakawan dan pengelola perpustakaan mengumpulkan produk internal instansi yang merupakan dokumen informasi publik berbentuk dokumen tercetak dan digital, menginventarisasi, mengklasifikasi serta mendokumentasikan berbagai jenis informasi publik sesuai formatnya. Berikut ini ketersediaan dokumen informasi publik yang tersedia di perpustakaan berdasarkan pemaparan para informan yang dikategorikan sesuai persentasenya yaitu Tinggi (76%-100%); Sedang (46-75%); dan Rendah (di bawah 45%). Keterangan lebih detailnya tersaji pada Tabel 3 di bawah ini.

d. Pelayanan PPID

Dalam hal dukungan memberikan layanan informasi publik PPID, hanya 4 informan yang menyatakan keterlibatan SDM perpustakaan sebagai petugas layanan informasi publik. Selain itu, 8 informan menyatakan adanya keterlibatan unit perpustakaan dalam memberikan layanan informasi publik langsung kepada pemohon informasi. Prosedur pemberian layanan informasi publik dari Unit Perpustakaan dalam membantu PPID di instansi para informan yaitu sesuai SOP Layanan Informasi Publik. Pertama, permohonan informasi publik dilayani oleh unit layanan informasi publik. Jika pemohon informasi publik membutuhkan dokumen informasi publik yang tersedia di perpustakaan, maka pemohon informasi publik diarahkan ke unit perpustakaan oleh petugas layanan informasi publik. Jika permohonan informasi publik disampaikan melalui sarana online seperti e-mail atau melalui sistem informasi, di mana dokumen yang dimohon terdapat di perpustakaan, maka PPID atau SDM di

unit layanan informasi publik mengirimkan memo atau disposisi kepada kepala perpustakaan agar menyiapkan bahan dokumen informasi publik tersebut ke unit layanan informasi publik. Pemberian informasi kepada pemohon informasi publik dapat berupa dokumen informasi publik yang tersedia di perpustakaan juga dari hasil penelusuran SDM perpustakaan pada sumber-sumber valid pada instansi tersebut.

Jumlah permohonan informasi yang dibantu penyiapan dokumen informasi publik oleh unit perpustakaan kementerian/lembaga selama setahun sangat bervariasi yaitu ada yang kurang dari 10, 30, hingga lebih dari 100 permohonan informasi. Informasi publik yang diminta pemohon dan dokumennya tersedia di unit perpustakaan terkait dengan jenis informasi terbuka yang dikuasai pada instansi tersebut. Misalnya permohonan mengenai informasi jumlah putusan serta jenis perkara konstitusi pada Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, data ekspor impor pada Perpustakaan Kementerian Perdagangan, kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau tentang manajemen pengetahuan nuklir pada Perpustakaan BATAN.

Tabel 3. Ketersediaan Dokumen Informasi Publik di Perpustakaan Kementerian/Lembaga

No.	Dokumen Informasi Publik	Jumlah Informan Yang Menjawab (%)	Kategori
1.	Informasi mengenai Daftar Informasi Publik yang Dikuasai		
	a. Dokumen Daftar Informasi Publik	13 (81,3%)	Tinggi
2.	Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik		
	a. Peraturan Badan Publik	12 (75%)	Sedang
	b. Keputusan Badan Publik	10 (62,5%)	Sedang
	c. Kebijakan Badan Publik	9 (56,3%)	Sedang
3.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta		
	a. Informasi penanganan Bencana Alam	5 (31,3%)	Rendah
	b. Informasi penanganan Bencana Sosial	2 (12,5%)	Rendah
	c. Informasi tentang penanganan terhadap Gangguan terhadap Utilitas Publik	7 (43,8%)	Rendah
4.	Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan		
	a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil, dan Keuangan	8 (50%)	Sedang
	b. Profil Badan Publik beserta pimpinannya	12 (75%)	Tinggi
	c. Dokumen Anggaran	5 (31,3%)	Rendah
5.	Data Statistik yang dibuat/dikelola Badan Publik	10 (62,5%)	Sedang

- e. Anggaran
Dalam hal anggaran, hanya 25% informan yang menyatakan mendapatkan dukungan anggaran untuk mendukung layanan informasi publik PPID. Jumlah anggaran yang sangat bervariasi yaitu kurang dari Rp 100.000.000,00 hingga Rp 150.000.000,00 per tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan publikasi, pembuatan dan pengembangan aplikasi, serta pembuatan materi yang menunjang kegiatan PPID pada instansinya.
- f. Pengembangan Sistem Informasi
Dalam hal pengembangan sistem informasi, terdapat 2 informan (12,5%) yang menyatakan turut berpartisipasi pada proses pengintegrasian sistem informasi perpustakaan dengan sistem informasi PPID. Walaupun hampir semua informan menyatakan bahwa unit perpustakaan yang dipimpinnya telah tersedia sistem informasi untuk koleksi perpustakaan, yaitu berupa sistem automasi perpustakaan (SLiMS, SIPuspa, Libranet, Ganesha Library Information System dan Digilib) dan sistem repositori/depositori produk kementerian/lembaga, baru 2 orang informan yang menyatakan telah mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan dengan sistem informasi PPID instansinya
- g. Pelaporan
Dalam hal pelaporan, hanya ada 1 informan (6,3%) yang menyatakan membuat laporan layanan perpustakaan terkait pelayanan informasi publik PPID. Masih banyak informan yang menyatakan belum adanya pencatatan khusus terkait penyiapan bahan informasi publik yang dibantu oleh unit perpustakaan.

Secara singkat, berdasarkan data yang dikumpulkan, berikut persentase yang hasilnya dapat ditafsirkan dengan kategori yang bersifat kualitatif yaitu Tinggi (76%-100%); Sedang (46-75%); dan Rendah (di bawah 45%). Tabel karakteristik jawaban selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Jawaban

Jawaban Informan		Jumlah Informan Yang Menjawab (%)	Kategori
1. Pengetahuan			
a.	Pengetahuan tentang PPID	14 (87,5%)	Tinggi
b.	Pengetahuan tentang perbedaan sarana prasarana antara unit layanan informasi publik dengan unit perpustakaan	13 (81,3%)	Tinggi
2. Koordinasi			
a.	Koordinasi dengan unit layanan informasi publik	9 (56,3)	Sedang
b.	Penerimaan dukungan dari Pimpinan Instansi/Pimpinan PPID terhadap pengelolaan Unit Perpustakaan	7 (43,8%)	Rendah
c.	Keikutsertaan atau penugasan dalam kegiatan PPID	5 (31,3%)	Rendah
d.	Partisipasi SDM perpustakaan melalui tercantumnya pada SK/struktur PPID	2 (12,5%)	Rendah
3. Pengelolaan Dokumen Informasi Publik			
a.	Penugasan untuk menyusun Daftar Informasi Publik/DIP pada instansinya	1 (6,3%)	Rendah

b.	Penugasan untuk mengelola dokumen informasi publik	4 (25%)	Rendah
4. Memberikan Layanan Informasi PPID			
a.	Keterlibatan sebagai petugas layanan informasi publik	4 (25%)	Rendah
b.	Keterlibatan Unit Perpustakaan memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi	8 (50%)	Sedang
5. Anggaran			
a.	Dukungan anggaran unit perpustakaan dalam kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik	4 (25%)	Rendah
6. Pengembangan sistem PPID			
a.	Partisipasi mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan dengan sistem informasi PPID instansinya	2 (12,5%)	Rendah
7. Pelaporan kegiatan PPID			
a.	Penugasan untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi Unit Perpustakaan kepada PPID	1 (6,3%)	Rendah

2. Hambatan dalam mendukung kinerja PPID

Para informan menyatakan beberapa hambatan kepala perpustakaan/ pustakawan/petugas unit perpustakaan dalam membantu PPID di instansinya yaitu belum adanya sinergisitas antara unit layanan informasi publik dengan unit perpustakaan. Hal ini disampaikan para informan karena belum adanya SOP yang terintegrasi antara unit layanan informasi publik dengan unit pendukung lainnya yang mengakibatkan dalam hal ini unit perpustakaan belum dilibatkan melalui penugasan khusus untuk membantu PPID. Selain itu, kurangnya dukungan regulasi pimpinan (berupa Surat Keputusan/SK) dalam menghimpun semua produk informasi internal kementerian/lembaga yang merupakan dokumen informasi publik yang terbuka di ruang perpustakaan serta pada repositori yang dikelola unit perpustakaan.

KESIMPULAN

Secara umum, dukungan unit perpustakaan kepada PPID berdasarkan persepsi kepala/pimpinan perpustakaan pada instansi kementerian/lembaga masih rendah. Hanya ada satu aspek yang tergolong tinggi yaitu aspek pengetahuan. Enam aspek lainnya masih tergolong sedang dan rendah. Dari paparan para informan dapat disimpulkan bahwa dukungan pimpinan lembaga untuk melibatkan perpustakaan untuk mendukung PPID sangat berpengaruh pada kinerja perpustakaan dalam mendukung PPID. Dukungan yang dilakukan perpustakaan selama ini berasal dari inisiatif perpustakaan seperti mengumpulkan dan mengelola informasi publik. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak aspek dukungan perpustakaan yang masih yang bisa dioptimalkan untuk membantu kinerja PPID.

Pada aspek koordinasi, peran pimpinan lembaga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi antara perpustakaan dan PPID. Pada aspek Pengelolaan Dokumen Publik, usaha untuk mengumpulkan informasi publik harus terus dilakukan dan dikelola dengan baik di perpustakaan agar proses temu kembali dan pelayanan perpustakaan lebih efektif dan efisien. Salah satu caranya yaitu dengan membangun sistem repositori institusi. Dalam hal pelayanan PPID, pustakawan dan staf perpustakaan bisa dilibatkan menjadi petugas layanan informasi publik. Selain itu, lokasi layanan informasi publik bisa didekatkan atau disatukan dengan lokasi layanan perpustakaan. Dalam hal anggaran, sebaiknya ada alokasi anggaran khusus untuk perpustakaan untuk mendukung layanan informasi publik. Dengan demikian, perpustakaan bisa lebih fokus melakukan kegiatan yang mendukung kinerja PPID. Terkait pengembangan Sistem Informasi, sebaiknya dilakukan koordinasi agar sistem informasi yang sudah ada di perpustakaan dapat terintegrasi dengan sistem informasi PPID. Dalam hal

pelaporan, perpustakaan sebaiknya melakukan pencatatan terkait layanan informasi terkait PPID, dari laporan tersebut dapat diketahui peranan perpustakaan dalam mendukung PPID. Selain itu dapat diketahui juga subjek informasi yang banyak diminta oleh pemohon informasi, sehingga menjadi bahan masukan perpustakaan dalam melakukan pengembangan koleksi untuk mendukung kinerja PPID.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang terlibat pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Aspikom*, 1(3).
- Budiani, R., & Suliyati, T. (2016). Analisis Kegiatan Evaluasi Layanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(3).
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Kementerian Keuangan. (2017). Ini Tiga Inovasi PPID Kemenkeu. Retrieved September 25, 2018, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tiga-inovasi-ppid-kemenkeu/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2010). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*.
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada pemerintah provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3), 165–186.
- Komisi Informasi Pusat. (2017). KI Pusat Beri Penghargaan 64 Badan Publik. Retrieved September 25, 2018, from <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-beri-penghargaan-64-badan-publik>
- Musajaya, I. (2017). *Penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mendukung keterbukaan informasi publik (Studi pada PPID dan 27 Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo*. Gadjah Mada University.
- Susilowati, N. (2014). *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Daerah (Studi Deskriptif Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri Selama Tahun 2008-2013*. Gadjah Mada University.
- Warenpan, N. J., Hadi, S. P., & Winarno, W. W. (2018). Peran Strategis Chief Information Officer dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2018*, Universitas AMIKOM Yogyakarta (pp. 13–18).
- Yasha, L. S. (2015). *Manajemen Humas Pemerintah dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang*. Andalas University.